

Provinsi Maluku sebagai salah satu wilayah administrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ,secara geografis merupakan wilayah kepulauan. Provinsi Maluku juga secara aspek kewilayahan memiliki posisi yang strategis karena dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, selain itu, Maluku memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar khususnya di bidang perikanan dan kelautan, energi, sumber minyak bumi, gas, batu bara dan sumber energi terbarukan yang melimpah seperti energi geothermal dan air. Demikian juga dengan ketersediaan lahan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. Berbagai potensi sumberdaya alam ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku memiliki modal pembangunan yang cukup besar dalam mendukung tercapainya target pembangunan daerah terutama di bidang sosial dan ekonomi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tata rencana Pembangunan yang disusun secara hierarkhis oleh Provinsi Maluku, diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk mencapai target pembangunan daerah di bidang sosial dan ekonomi yang menitikberatkan pada upaya memantapkan perekonomian daerah yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dijiwai kearifan lokal berbasis kepulauan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Periode Tahun 2014 - 2019 telah menetapkan 9 (sembilan) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, yaitu : (1) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Pertumbuhan Ekonomi, (3) Terlaksananya Swasembada Pangan, (4) Penurunan Ketimpangan Regional, (5) Tingkat Pertumbuhan Penduduk, (6) Peningkatan Ekspor, (7) Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan (9) Penurunan Tingkat Pengangguran. Target pencapaian indikator pembangunan daerah periode 2014 - 2019 dijelaskan pada Tabel 4.1.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta upaya meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta dukungan infrastruktur wilayah. Upaya Pemerintah Provinsi Maluku dalam pencapaian indikator kinerja terutama infrastruktur saat ini dapat digambarkan digambarkan sebagai berikut:

- Panjang sistem jaringan jalan nasional di Maluku dalam keadaan mantap mencapai 562,43 km atau 43,35% dan tidak mantap mencapi 734,97% km atau 56,65%.
- Pada tahun 2014 capaian pelayanan air bersih di Provinsi Maluku telah mencapai 52,5% (Dinas PU Provinsi Maluku, 2015).
- Jaringan Irigasi Fungsional masih terbatas, saat ini hanya terbangun seluas 14.648 hektar dari target sebesar 34.910 hektar hingga tahun 2014.

- Sarana pelabuhan penyeberangan baru yang direncanakan sebanyak 30 buah, yang sedang dibangun 9 buah. (Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, 2015).
- Jumlah kapal penyeberangan yang direncanakan sebanyak 24 unit dan baru tersedia sebanyak 22 unit. (Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, 2015).
- Dermaga pelabuhan singgah dari jumlah total yang dibutuhkan sebanyak 133 unit, sampai dengan tahun 2015 telah terbangun sebanyak 49 unit (Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, 2015).
- Di Bidang Perhubungan Udara, Landasan Bandar Udara Saumlaki, Dobo dan Lapangan Terbang Perintis Banda, Waihai, Amahai, Kisar, Namrole, Namlea, dan Larat masih membutuhkan pengembangan. Sedangkan Lapangan Terbang di Tepa, Moa dan Ilwaki belum tersedia.
- Penyediaan layanan informasi telekomunikasi melalui telepon telah mencapai 375 desa di Maluku hingga tahun 2014 dari yang direncanakan sebanyak 710 desa. (Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku, 2015).
- Rasio Elektrifikasi di Maluku terus meningkat dan telah mencapai 60,95%, sebagian besar beberapa daerah dan desa yang belum memiliki listrik berada di kabupaten yang di wilayah perbatasan negara, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya yang belum terjangkau layanan Listrik secara memadai. (Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku, 2015).

Tabel. 4.1. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR	TARGET KINERJA			
	2013	2014	2015	2016
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,70	72,95	73,45	73,95
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14	6,74	6,25	6,5
Swasembada Pangan Strategis (%)	35	40	45	50
Ketimpangan Regional		0,48	0,44	0,41
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Mngkt	Mngkt	Mngkt	Mngkt
Tingkat Kemiskinan (%)	19,27	18,44	16,95	15,68
Tingkat Pengangguran (%)	9,75	10,51	6.16	5,71

Sumber: Bappeda Provinsi Maluku, 2015 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1, pencapaian target indikator kinerja utama tersebut di atas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa isu penting yang harus ditangani agar tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Prioritas dan Fokus Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2016 secara berurutan ditetapkan sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi serta Pemantapan Demokrasi, Keamanan, Ketertiban dan Kualitas Perdamaian.

Fokus :

- a) Peningkatan Profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara)
- b) Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat
- c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hukum, Ketertiban dan Keamanan dan Perdamaian
- d) Peningkatan Harmonisasi Pembangunan antar Tingkat Pemerintahan dan Pemangku Kepentingan
- e) Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan serta Penganggaran Daerah
- f) Pemantapan Demokrasi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- g) Meningkatkan Kerukunan Intern antar Umat Beragama dan Kearifan Lokal
- h) Penegakan Produk Hukum Daerah

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Fokus :

- a) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
- b) Peningkatan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- c) Peningkatan perlindungan hak-hak adat masyarakat
- d) Peningkatan dan pemerataan kapasitas masyarakat dalam pemerataan hak dasar bagi masyarakat miskin;
- e) Peningkatan kesetaraan Gender dan perlindungan anak
- f) Perluasan akses dan pemerataan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- g) Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, Perluasan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan dan Perlindungan Tenaga Kerja

3. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan.

Fokus :

- a) Peningkatan Kapasitas, Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- b) Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Pendidikan
- c) Peningkatan dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Olahraga
- d) Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan
- e) Peningkatan Potensi dan Peran Pemuda dalam Olahraga

4. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Fokus :

- a) Peningkatan dan Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
- b) Peningkatan Kapasitas, Jumlah serta Upaya Pendayagunaan Tenaga Kesehatan secara Merata
- c) Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan
- d) Perbaikan Gizi Masyarakat serta Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
- e) Peningkatan Upaya Pencegahan, Pemberantasan, Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan
- f) Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan dan pengawasan obat dan Makanan
- g) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, Swasta dan Masyarakat Madani Dalam Pembangunan Kesehatan
- h) Peningkatan Kualitas Manajemen dan Pembiayaan Kesehatan, sistem Informasi serta Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar.

Fokus :

- a) Peningkatan dan Pemerataan Penyediaan Infrastruktur Transportasi, Sumberdaya Air, Telekomunikasi dan Listrik;
- b) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Infrastruktur Transportasi, Sumberdaya Air, Telekomunikasi dan Listrik
- c) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Permukiman
- d) Peningkatan Konektifitas
- e) Pengembangan Perumahan Rakyat
- f) Pemanfaatan Energi Terbarukan termasuk Energi Alternatif

6. Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Usaha.

Fokus :

- a) Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
- b) Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama Pengembangan Usaha
- c) Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
- d) Peningkatan Industri Pengolahan Skala Kecil, Menengah dan Skala Besar serta Kawasan Industri
- e) Peningkatan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Daerah terutama Wisata Bahari, Alam, Budaya dan Sejarah
- f) Peningkatan Infrastruktur Pendukung Penguatan Perekonomian Daerah
- g) Peningkatan Promosi Investasi
- h) Peningkatan Usaha Perdagangan, Eksport dan Penataan Jaringan Distribusi dan Pemasaran

7. Peningkatan Ketahanan Pangan.

Fokus :

- a) Peningkatan Produktivitas Pangan Strategis dan Pangan Lokal daerah;
- b) Peningkatan Diversifikasi Pangan Lokal
- c) Peningkatan Jumlah dan Kualitas Penyuluh Pertanian
- d) Penataan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan keamanan Pangan

8. Optimalisasi Penataan Ruang, Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Terdepan, Terluar serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kawasan Rawan Bencana.

Fokus :

- a) Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b) Pengembangan Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Terluar dan Terdepan
- c) Pelestarian Lingkungan Hidup
- d) Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- e) Mitigasi Bencana, Percepatan Penanganan Dampak Bencana serta Penanggulangan Bencana

9. Pengembangan Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi.

Fokus :

- a) Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai-nilai Budaya Lokal serta Destinasi Wisata;;
- b) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
- c) Peningkatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK (P3IPTEK) di Bidang Ketahanan Pangan, Energi Baru Terbarukan dan Sosial Kemasyarakatan

Matriks Prioritas dan Rencana Kerja (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.